



## SINERGI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID XII

Nidya Waras Sayekti\*)

### Abstrak

*Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII telah diluncurkan pemerintah pada akhir April 2016. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan berusaha melalui pengurangan prosedur, izin, waktu, dan biaya pengurusan. Implementasi dari kebijakan tersebut dan paket-paket kebijakan sebelumnya diharapkan dapat mengantarkan Indonesia kepada predikat layak investasi sehingga mudah mengakses pasar keuangan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Evaluasi atas paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah juga perlu dilakukan. DPR sebagai pemegang fungsi pengawasan, diharapkan dapat melaksanakan perannya dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan paket kebijakan tersebut serta memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah berikutnya.*

### Pendahuluan

Pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid XII pada 28 April 2016 sebagai kelanjutan deregulasi ekonomi di Indonesia yang memfokuskan pada kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*). Paket kebijakan ekonomi jilid XII ini memangkas sejumlah izin, prosedur, waktu, dan biaya untuk kemudahan berusaha, terutama untuk pengusaha pemula. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2016 mencapai 4,92 persen, artinya mengalami peningkatan sebesar 0,34 persen dibandingkan kuartal IV 2015. Laju pertumbuhan ekonomi secara tahunan lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2015, yang pada saat itu pertumbuhannya sebesar 4,73 persen.

Paket kebijakan ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi ke depan.

Selain memberi stimulus ekonomi Indonesia, paket kebijakan ekonomi jilid XII diharapkan juga melahirkan banyak pengusaha baru. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga menyambut positif semua kebijakan yang menyangkut kemudahan dalam berusaha di Indonesia. Melalui kemudahan ini diharapkan tercipta lapangan pekerjaan baru melalui investasi yang masuk. Sedangkan menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto, paket-paket kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Paket-paket tersebut tidak

\*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: nidya.ws@dpr.go.id



Tabel Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia

Kriteria	2014	2015	2016
Memulai Usaha	158	163	173
Perjanjian Pembuatan Izin	150	110	107
Mendapatkan Listrik	101	45	46
Pendaftaran Hak Milik	112	131	131
Mendapatkan Kredit	67	71	70
Perlindungan Investor Minoritas	43	87	88
Pembayaran Pajak	158	160	148
Perdagangan Lintas Perbatasan	61	104	105
Pelaksanaan Kontrak	171	170	170
Memecahkan Masalah Kebangkrutan	71	73	77

Keterangan: Jumlah negara yang diperingkat adalah 189 negara.

Sumber: Litbang "Kompas"/IWN, disarikan dari Bank Dunia.

dapat menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat karena belum bisa menyentuh ke bawah.

Implementasi paket kebijakan ekonomi I-XI, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mencapai 94–95 persen. Namun, perbaikan dari sisi institusi, ekonomi, internasional, dan moneter masih terus perlu dilakukan agar Indonesia bisa mencapai peringkat layak investasi. Oleh karena itu, menarik untuk diketahui isi dari paket kebijakan ekonomi Jilid XII ini sebagai upaya peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia yang dalam implementasinya membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

### Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII

Paket kebijakan ekonomi jilid XII mencakup sepuluh indikator tingkat kemudahan berusaha yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu Memulai Usaha (*Starting Business*), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (*Dealing with Construction Permit*), Pembayaran Pajak (*Paying Taxes*), Akses Perkreditan (*Getting Credit*), Penegakan Kontrak (*Enforcing Contract*), Penyambungan Listrik (*Getting Electricity*), Perdagangan Lintas Negara (*Trading Across Borders*), Penyelesaian Perkara Kepailitan (*Resolving Insolvency*), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (*Protecting Minority Investors*).

Dari kesepuluh indikator tersebut, jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur dikurangi menjadi 49 prosedur. Begitu pula jumlah perizinan, dikurangi dari 9 izin menjadi 6 izin. Jika sebelumnya waktu yang dibutuhkan berjumlah 1.566 hari, kini dipersingkat menjadi 132 hari dengan biaya

yang dibutuhkan lebih dari Rp92,8 juta menjadi sekitar Rp72,7 juta. Perhitungan total waktu dan biaya tersebut belum menghitung jumlah hari dan biaya perkara pada indikator penyelesaian perkara kepailitan karena belum ada praktik dari peraturan yang baru diterbitkan.

Lembaga pemeringkat *Standard and Poors* (S&P) mengapresiasi langkah Indonesia dalam mereformasi struktur ekonomi untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Indonesia baru mendapatkan peringkat investasi BB+ dengan proyeksi positif. Proyeksi positif itu sudah meningkat dari posisi sebelumnya, yakni proyeksi stabil pada Mei 2015. Lembaga pemeringkat lain, yakni *Moody's Investors Service* dan *Fitch Ratings*, sudah memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia. Dengan perbaikan dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi di Indonesia, terbuka kemungkinan bagi Indonesia untuk mendapatkan peringkat layak investasi dari S&P tahun ini. Namun, hal ini sangat bergantung pada hasil evaluasi S&P setelah melihat implementasi langkah-langkah perbaikan itu di lapangan. Perkembangan peringkat kemudahan berusaha Indonesia dapat dilihat pada Tabel di atas.

Berdasarkan Tabel tersebut, hampir semua indikator mengalami penurunan dari tahun ke tahun, kecuali indikator perjanjian pembuatan izin yang mengalami kenaikan peringkat dari peringkat 150 pada tahun 2014 menjadi peringkat 110 pada tahun 2015 dan peringkat 107 pada tahun 2016. Sedangkan peringkat memulai usaha di Indonesia pada tahun 2014 berada pada posisi 158 dan terus

menurun di tahun 2015 menjadi ke 163, kemudian di tahun 2016 ke posisi 173 dari 189 negara. Oleh karena itu, melalui paket kebijakan ekonomi jilid XII ini diharapkan tumbuh usaha-usaha baru di Indonesia sehingga dapat meningkatkan peringkat Indonesia.

Kenaikan peringkat menjadi layak investasi diharapkan menarik modal asing masuk, termasuk ke pasar Surat Utang Negara (SUN) sehingga biaya dana yang perlu disediakan pemerintah menjadi lebih sedikit. Sedangkan di sektor riil, kenaikan peringkat menjadi layak investasi akan mengurangi keraguan investor sektor riil ke Indonesia. Kepercayaan investor terhadap Indonesia terlihat dari peningkatan titik investasi dari 10.500 titik pada tahun 2014 menjadi 20.000 di tahun 2015.

Sejalan dengan hal tersebut, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah, terutama pemerintah daerah (Pemda), untuk tidak meremehkan investasi sektor UMKM daripada investasi perusahaan besar karena kontribusi UMKM atas investasi nasional sekitar 50 persen per tahun.

## Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII adalah paket besar dan penting dengan cakupan luas, yang tidak hanya dijalankan di tingkat pusat, namun juga di daerah. Dalam penutupan *International Trade and Investment Summit Series Week 2016* yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta 7 Mei 2016, Presiden mengingatkan Pemda untuk tidak membuat Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat pembangunan dan investasi. Perda-perda juga diharapkan tidak berbenturan dengan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Sebab, paket kebijakan tersebut dapat berdampak positif untuk pembangunan daerah.

Presiden berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Bentuk konkrit sinergi itu salah satunya dengan merombak regulasi-regulasi penghambat. Saat ini ada sekitar 42.000 aturan pusat dan daerah, serta terdapat 3000-an Perda yang menjadi target penghapusan karena menghambat investasi. Dengan aturan sebanyak ini, kecepatan bertindak menjadi lambat padahal perubahan global sangat cepat.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan masih ada hambatan di sejumlah Pemda untuk membuka kemudahan perizinan usaha seluas-luasnya dalam implementasi Paket Kebijakan Ekonomi jilid XII. Masih ada sejumlah kepala daerah yang belum melakukan deregulasi perda yang menghambat karena menilai aturan yang menghambat dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah (Otda). Di sisi lain, Pemerintah Pusat melalui serial paket kebijakan ekonomi ingin membangun tata kelola yang efektif dan efisien, yang diharapkan mampu memacu/mempercepat roda perekonomian menjadi lebih maksimal. Saat ini, sudah ada perbaikan yang cukup maju untuk perizinan di sejumlah daerah, yang kini mulai bisa diurus di tingkat kecamatan, tidak perlu ke kabupaten/kota.

Sebagai contoh, Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) mengeluarkan kebijakan pelimpahan kewenangan kepada camat untuk pembuatan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) dalam bentuk izin satu lembar sebagai wujud pengembangan ekonomi kerakyatan. Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Perpres No. 98 Tahun 2014. Hal serupa juga dilakukan Pemkot Pekanbaru dengan mendelegasikan kewenangan perizinan ke tingkat kecamatan. Pemkot Pekanbaru sudah melakukan deregulasi untuk mendorong perbaikan iklim bisnis di daerah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan implementasi Paket Kebijakan Ekonomi jilid XII memang ada yang masih menunggu diterbitkannya Perda, seperti Perda mengenai kemudahan izin usaha. Oleh karena itu, pemerintah mengharap agar Pemda bisa segera menerbitkan Perda agar implementasi Paket Kebijakan Ekonomi XII bisa berjalan mulus. Namun, untuk diterbitkannya Perda, Gubernur, Walikota, dan Bupati harus berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk itu, tidak bisa diprediksi pengimplementasiannya karena masih menunggu diterbitkannya Perda.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sanny Iskandar, menuturkan paket kebijakan yang bertujuan menjadikan Indonesia lebih layak untuk investasi seharusnya juga dilakukan pemerintah daerah, tidak hanya oleh pemerintah pusat. Pasalnya, sebagian besar kegiatan investasi, khususnya industri manufaktur dilakukan di

wilayah kabupaten/kota. Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyebutkan pemerintah perlu melibatkan pelaku usaha sektoral untuk mengawal pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah. Kebijakan ekonomi juga tergantung dari BUMN dan pemerintah daerah. Untuk itu, BUMN yang tidak ingin melaksanakan kebijakan pemerintah sebaiknya diberi peringatan.

Desakan kepada Pemda untuk segera merespons Paket Kebijakan Ekonomi jilid XII yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat juga datang dari akademisi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak, Eddy Suratman, mengatakan penerbitan Perda berimplikasi positif terhadap munculnya para pelaku baru khususnya UMKM. Sejak paket kebijakan ekonomi I - XI, belum ada satu daerah pun di Provinsi Kalimantan Barat yang membuat Perda. Dengan adanya Perda yang mengacu kepada paket kebijakan, pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum, khususnya dalam hal mendapatkan izin usaha yang ringkas. Namun, Eddy menilai pemerintah pusat harus memberikan motivasi kepada Pemda dalam menyusun Perda agar sinergi dengan paket kebijakan yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, Kemendagri diharapkan bergerak dengan memberikan mandat kepada pemprov atas pelaksanaan setiap poin kebijakan di daerah.

## Penutup

Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I – XII. Paket-paket kebijakan ekonomi tersebut dikeluarkan dengan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui upaya mempermudah berusaha. Dalam pelaksanaannya, paket-paket kebijakan tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pencapaian tujuan dari paket kebijakan yang telah dikeluarkan dapat tercapai dengan cepat.

DPR harus mengefektifkan fungsi pengawasannya guna memantau dan mengevaluasi pelaksanaan paket kebijakan ini. Salah satunya, melalui peran pengawasan Komisi II terkait kuantitas dan kualitas peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, DPR dapat memberikan masukan untuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah berikutnya sehingga tujuan negara untuk kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam ekonomi dapat tercapai.

## Referensi

- “Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII: Presiden Tegur Menteri Segera Melaksanakannya”, *Neraca*, 11 Mei 2016.
- “Indonesia Ingin Naik Peringkat, Layak Investasi akan Menarik Investor Pasar Uang dan Sektor Riil”, *Kompas*, 11 Mei 2016.
- “Jokowi: Perda Jangan Hambat Kebijakan Ekonomi”, *Suara Pembaruan*, 9 Mei 2016.
- “Perbaiki agar Layak Investasi”, *Kompas*, 10 Mei 2016.
- “Presiden Tagih Langkah Percepatan Investasi”, *Media Indonesia*, 10 Mei 2016.
- Aditya, Arys. “BKPM: Implementasi Paket Kebijakan Sudah 95%”, <http://finansial.bisnis.com/read/20160429/9/543194/bkpm-implementasi-paket-kebijakan-sudah-95>, diakses 10 Mei 2016.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. “Paket Kebijakan XII: Pemerintah Pangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia”, <http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-xii-pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-berusaha-di-indonesia/>, diakses 11 Mei 2016.
- Hendra TM, Lukas. “Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi XII, Perda Harus Dipercepat”, <http://finansial.bisnis.com/read/20160509/9/545457/implementasi-paket-kebijakan-ekonomi-xii-perda-harus-dipercepat>, diakses 11 Mei 2016.
- Hilman, Muhamad. “FIB: Tidak Mudah Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi”, <http://finansial.bisnis.com/read/20160510/9/545866/fib-tidak-mudah-implementasi-paket-kebijakan-ekonomi>, diakses 11 Mei 2016.
- Ruslan, Heri. “Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII Direspons Positif”, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/05/09/06wyxp372-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-xii-direspons-positif>, diakses 9 Mei 2016.
- Zuhriyah, Dewi Aminatuz. “Paket Kebijakan Jokowi Belum Sentuh Masyarakat”, <http://kabar24.bisnis.com/read/20160429/15/543086/paket-kebijakan-jokowi-belum-sentuh-masyarakat>, diakses 11 Mei 2016.